



SALINAN

**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang masih belum memenuhi perkembangan yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jombang dikarenakan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.**

**Pasal I**

1. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 27 Juni 2022

**BUPATI JOMBANG,**

ttd

**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 27 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

**AGUS PURNOMO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 25/E**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670105199212 1001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**A). VISI : “BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING”**

**B). MISI**

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional.
2. Mewujudkan Masyarakat Jombang Yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya.
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal, dan Industri.

**C). INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENGAMPU</b>
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas	1. Indeks Good Governance	Indikator Komposit dari : 1. Taat Hukum 2. Partisipasi 3. Daya Tanggap 4. Transparansi 5. Akuntabilitas 6. Kesetaraan 7. Efektifitas dan Efisiensi 8. Visi Strategis	Hasil Survey IGG	- BAPPEDA - SETDA - INSPEKTORAT

TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENGAMPU
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	2. Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran}} \times 100$ Keterangan: IPM = Indeks Pembangunan Manusia $I_{\text{kesehatan}}$ = Indeks kesehatan $I_{\text{pendidikan}}$ = indeks pendidikan $I_{\text{pengeluaran}}$ = indeks pengeluaran	BPS	- BAPPEDA - SETDA
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya	3. Indeks Kesalehan Sosial	Indikator Komposit dari aspek sikap peduli, aspek sikap memberi, aspek menghargai perbedaan, aspek tidak memaksakan nilai, aspek tidak menghina nilai yang berbeda, aspek keterlibatan dalam demokrasi, aspek keterlibatan dalam <i>good government</i> aspek pencegahan kekerasan, aspek keterlibatan dalam konservasi (pemeliharaan lingkungan), dan aspek keterlibatan dalam restorasi	Hasil Survey IKS	BAPPEDA
4. Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	4. Pertumbuhan Ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB (Ekonomi):  $\frac{\text{PDRB ADHK } n - \text{PDRB ADHK } n - 1}{\text{PDRB ADHK } n - 1} \times 100\%$ Keterangan: n = Realisasi PDRB ADHK Tahun Berjalan n-1 = Realisasi PDRB ADHK Tahun lalu	BPS	BAPPEDA
	5. Indek Gini	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ Keterangan : $F_i$ = Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas i $Y_i$ = Jumlah kumulatif pendapatan pada kelas i	- DPPKB,PPPA - DISNAKER - DINSOS - PUPR	- DPPKB,PPPA - DISNAKER - DINSOS - PUPR

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENGAMPU</b>
	6. Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman	IKL KP = (Indeks Infrastruktur Permukiman x 60%) + (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup x 30%) + (Indeks Risiko Bencana x 10%)	- DLH - DISPERKIM - BPBD	- DLH - DISPERKIM - BPBD

#### **D). INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja Birokrasi	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB dan atau PMPRB	Kementerian PAN dan RB	- SETDA - Inspektorat - BAPPEDA
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)	IKPP = [ (IKM non konversi x 2,5) + (IPP x 2)] / 2 Keterangan: IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat IPP = Indeks Pelayanan Publik	- Hasil Survey IKM - Hasil Survey IPP	- SETDA - BAPPEDA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	3. Indeks Profesionalitas Aparatur	<p>IP ASN = Jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing - masing jawaban indikator.</p> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ <p>Keterangan:  IP = Indeks Profesionalisme  IP<sub>i</sub> = Indeks Profesionalisme ke-I  IP<sub>1</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi  IP<sub>2</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi  IP<sub>3</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja  IP<sub>4</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p>	BKDPP	BKDPP
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik	4. Indeks SPBE	<p>Hasil Penilaian Kementerian Kominfo atau Penilaian Mandiri</p> <p>Indeks SPBE = 1/100 x (jumlah (nilai domain x bobot domain))</p>	Kementerian PAN dan RB	- SETDA - KOMINFO
5.	Meningkatnya Derajat Pendidikan	5. Indeks Pendidikan	$= \frac{IHLS + IRLS}{2}$ <p>Keterangan :  I HLS = Indeks Harapan Lama Sekolah  I RLS = Indeks Rata - Rata Lama Sekolah</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	6. Indeks Kesehatan	$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$ <p>Keterangan :  AHH = Angka Harapan Hidup  AHH maks = Angka Harapan Hidup Maksimal  AHH min = Angka Harapan Hidup Minimal</p>	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
7.	Meningkatnya Kestaraan dan Keadilan Gender	7. Indeks Pembangunan Gender	<p><i>IPG = Rasio IPM Perempuan dan IPM Laki – laki</i></p> $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki} - \text{Laki}}$ <p><i>IPM Perempuan = Indeks Pembangunan Perempuan</i>  <i>IPM Laki – Laki = Indeks Pembangunan Laki – laki</i></p>	Dinas PPKB, PPPA	Dinas PPKB, PPPA
8.	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum Dan Kesadaran Berbudaya	8. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Menghitung Nilai persepsi 4 variabel yang ditentukan	SATPOL PP	SATPOL PP
		9. Persentase Penurunan Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD	Persentase Penurunan Potensi Konflik = [(Potensi tahun (n-1)-Potensi tahun n) / Potensi tahun (n-1)] X 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		10. Persentase Seni Budaya Yang Dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Seni Budaya Lokal Yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Seni Budaya Lokal}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.	Meningkatnya Investasi Daerah	11. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	<p>Persentase Peningkatan Realisasi Investasi :</p> $= \frac{n - (n - 1)}{(n - 1)} \times 100\%$ <p>Keterangan :  n = Realisasi Investasi Tahun Berjalan  n-1 = Realisasi Investasi Tahun Lalu</p>	DPMPSTP	DPMPSTP
10.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	12. Jumlah Desa Mandiri	JDM = Nilai batas lebih dari 0,817 dalam Indeks Desa Membangun (IDM)	Hasil Penilaian IDM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
11.	Meningkatnya Kunjungan Wisata	13. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	(Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun n - Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun n-1) / Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun n-1 x 100	DISPORAPAR	DISPORAPAR
12.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	14. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	<p><i>Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan adalah rata-rata pertumbuhan ADHK kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, Kategori industri Pengolahan dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor.</i></p> $R = \frac{R1 + R2 + R3}{3}$ <p><i>R1 = Pertumbuhan PDRB ADHK kategori pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian.</i></p> <p><i>R2 = Pertumbuhan PDRB ADHK kategori industri Pengolahan.</i></p> <p><i>R3 = Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor</i></p>	BPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pertanian</li> <li>- Dinas Peternakan</li> <li>- Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> </ul>
13.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	15. Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan = Persentase dari jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita / bulan dibawah garis kemiskinan dibanding jumlah penduduk x 100%	Dinas Sosial	Dinas Sosial
14.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	16. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$= \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	BPS	DISNAKER
15.	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Daya Saing	17. Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur = (Indeks Pembangunan Infrastruktur bidang PU x 90%) + (Indeks Kualitas Layanan Transportasi x 10%) atau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas PUPR</li> <li>- DISHUB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas PUPR</li> <li>- DISHUB</li> </ul>

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Indeks Pembangunan Infrastruktur = (Indeks Kondisi Ruas Jalan x 40%) + (Indeks Ketersediaan Air Irigasi x 30%) + (Indeks Pemenuhan SPM Bina Konstruksi x 10%) + (Indeks Kualitas Layanan Transportasi x 10%) + (Indeks Kesesuaian Tata Ruang x 10%)		
16.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kawasan Permukiman	18. Indeks Infrastruktur Permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman = (Indeks infrastruktur lingkungan permukiman x 80%) + (Indeks Layanan Pengolahan Sampah x 20%)  atau (Indeks Rumah Rangka dengan akses air minum layak x 20%) + (Indeks Rumah Rangka dengan akses sanitasi layak x 20%) + (Indeks Penanganan Kawasan Kumuh x 20%) + (Indeks Penanganan Rumah Tidak Layak Huni x 20%) + (Indeks Layanan Pengolahan Sampah x 20%)	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
		19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = 30% IKA + 30% IKU + 40% ITL Keterangan: IPA : Indeks Kualitas Air IPU : Indeks Kualitas Udara ITL : Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		20. Indeks Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana = Bahaya x (Kerentanan / Kapasitas)	BPBD	BPBD

**BUPATI JOMBANG,**

**MUNDJIDAH WAHAB**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JOMBANG****NOMOR : TAHUN 2022****TANGGAL :****INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****1. Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang**

- INSTANSI : **Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang**
- VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing
- MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional
- TUJUAN : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Publik
- TUGAS : Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
- FUNGSI : 1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;  
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;  
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;  
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah;  
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/ FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai LPPD Tahun - n	Laporan Kegiatan	Bagian Tata Pemerintahan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP tahun - n	LHE SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Bagian Organisasi
		Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP SETDA tahun - n	LHE AKIP oleh Tim APIP	Bagian Perencanaan dan Keuangan

		Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	$\frac{\text{Nilai RB}}{\text{Nilai PMPRB}} \times 100\%$	Hasil LHE RB oleh Kementerian PAN dan RB	Bagian Organisasi
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan	Persentase Peningkatan IKM Pemerintah Daerah	$\frac{\text{IKM tahun } n - \text{IKM tahun } n - 1}{\text{IKM tahun } n - 1} \times 100\%$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi
		Persentase Peningkatan IPP Pemerintah Daerah	$\frac{\text{IPP tahun } n - \text{IPP tahun } n - 1}{\text{IPP tahun } n - 1} \times 100\%$	LHE IPP tahun n dan LHE IPP tahun n - 1	Bagian Organisasi
		Persentase kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE	$\frac{\text{Nilai SPBE}}{\text{Nilai PMP SPBE}} \times 100\%$	Hasil LKE PMP SPBE dan LHE SPBE oleh Kementerian PAN dan RB	Bagian Organisasi

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 2. Inspektorat Kabupaten Jombang

INSTANSI : **Inspektorat Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional

TUJUAN : Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

TUGAS : Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan Pemerintah Daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Hasil Pengawasan yang berkualitas dan akuntabel	Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Laporan Hasil Pemetaan SPIP	Inspektorat
		Kapabilitas APIP	Level peningkatan kapabilitas APIP	Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat
		Nilai AKIP OPD	Nilai evaluasi AKIP tahun - n	Hasil evaluasi AKIP Inspektorat	Inspektorat

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang

- INSTANSI : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang**
- VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing
- MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional
- TUJUAN : Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
- TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
- FUNGSI : 1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan ;  
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;  
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;  
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan ;  
5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) : (20% x skor hasil aspek proses) + (50% x skor hasil aspek isi) + (30% x skor hasil aspek Tindak Lanjut Hasil Perencanaan)	-Laporan pengukuran IKP -Kertas Kerja pengukuran IKP	Kepala BAPPEDA
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Metode Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) : <b>Skor Total = ISP + rata-rata ISI</b> $ISP = \sum_{i=1}^{16} \text{Skor Indikator satuan Pemda ke } i$ $\text{rata-rata ISI} = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=17}^{36} \text{Skor Indikator satuan Inovasi ke } i \text{ Inovasi ke } j}{n}$ Keterangan : <i>n</i> = Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah <i>i</i> = Nomor Indikator <i>j</i> = Nomor Inovasi	Hasil Penilaian IDD oleh Kemendagri	Kepala BAPPEDA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p><i>ISP = Indikator Satuan PEMDA</i>  <i>ISI = Indikator Satuan Inovasi</i></p> <p>Penghitungan Indeks Inovasi Daerah (IID) :  <b>Skor Total = ISP + rata-rata ISI</b>  <i>Indeks Inovasi Daerah</i>  <math display="block">= \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%</math> <i>Keterangan :</i>  <i>Skor Total Maksimum 250</i>  <i>Skala IDD adalah 0 s.d. 100</i>  <i>Dengan proporsi Aspek sebagai berikut :</i>  - Satuan Pemda sebesar 40%, dengan 16% merupakan skor jumlah Inovasi  - Satuan Inovasi Daerah sebesar 60%</p>		
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BAPPEDA	Nilai evaluasi AKIP tahun - n	Hasil evaluasi AKIP	Kepala BAPPEDA

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang

- INSTANSI : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang**
- VISI : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing
- MISI : Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya
- TUJUAN : Meningkatkan Derajat Pendidikan  
Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya  
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
- TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan bidang Kebudayaan
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;  
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;  
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan;  
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;  
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK jenjang Paud sederajat	Jumlah Penduduk Yang Bersekolah PAUD ----- X100% Jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun	Profil Pendidikan dan Kebudayaan / DAPODIK	Bidang Paud dan PNF
		APK jenjang SD sederajat	Jumlah siswa jenjang SD sederajat ----- X100% Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Profil Pendidikan dan Kebudayaan / DAPODIK	Bidang Pembinaan SD
		APK jenjang SMP sederajat	Jumlah siswa jenjang SD sederajat usia 7 – 12 tahun ----- X100% Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Profil Pendidikan dan Kebudayaan / DAPODIK	Bidang Pembinaan SD
		APM jenjang SD sederajat	Jumlah siswa jenjang SMP sederajat -----X100% Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Profil Pendidikan dan Kebudayaan / DAPODIK	Bidang Pembinaan SMP

		APM jenjang SMP sederajat	$\frac{\text{Jumlah siswa jenjang SMP Sederajat usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan / DAPODIK	Bidang Pembinaan SMP
		Persentase SD terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah Sekolah yang Terakreditasi A jenjang SD}}{\text{Jumlah Sekolah SD}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan / DAPODIK	Bidang Pembinaan SD dan Bidang PTK
		Persentase SMP terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah Sekolah yang Terakreditasi A jenjang SMP}}{\text{Jumlah Sekolah SMP}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan / DAPODIK	Bidang Pembinaan SMP dan Bidang PTK
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi}}{\text{Jumlah Tenaga Pendidik}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan / DAPODIK	Bidang PTK
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah seni dan budaya Kabupaten Jombang}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan / DAPODIK	Bidang Kebudayaan
4.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP	Seluruh Bidang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****5. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang**

1. INSTANSI : **Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang**
2. VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing
3. MISI : Masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya
4. TUJUAN :
  1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
  2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
5. TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan
6. FUNGSI :
  1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
  4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup fungsinya;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat	<b>Indeks Kualitas Kesehatan Masyarakat :</b> Jumlah capaian 15 indikator dikali dengan bobot masing-masing indikator dengan rincian bobot sebagai berikut : a. Angka kematian Ibu (AKI) dengan bobot 7% b. Angka kematian bayi (AKB) dengan bobot 7%	Profil Bidang Kesehatan Kabupaten Jombang	Kepala Dinas Kesehatan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Angka kematian Anak Balita dengan bobot 7%</li> <li>d. Prevalensi gizi buruk dengan bobot 7%</li> <li>e. Prevalensi stunting dengan bobot 7%</li> <li>f. Persentase rumah sehat dengan bobot 6%</li> <li>g. Persentase desa UCI dengan bobot 6%</li> <li>h. Insiden rate penyakit menular dengan bobot 7%</li> <li>i. Insiden rate DM dan HT dengan bobot 7%</li> <li>j. Tingkat kemadirian ODGJ berat dengan bobot 8%</li> <li>k. Persentase fasilitas kesehatan memenuhi standar dengan bobot 6%</li> <li>l. Persentase ketersediaan obat, vaksin dan BHP di Puskesmas sesuai standar dengan bobot 6%</li> <li>m. Persentase sumber daya manusia kesehatan di Faskes sesuai standar dengan bobot 6%</li> <li>n. Persentase penyedia sediaan Farmasi, alkes dan makanan minuman sesuai standar dengan bobot 6%</li> <li>o. Persentase rumah tangga sehat dengan bobot 7%</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--

2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun - n	Hasil evaluasi AKIP Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
----	---	---------------------	-------------------------------	-------------------------------------	------------------------

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****6. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

MISI : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri

TUJUAN : 1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah  
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

TUGAS : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang tenaga kerja

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di Bidang Tenaga Kerja  
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Tenaga Kerja  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Tenaga Kerja  
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja  
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja  
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja  
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/ FORMULA</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$\frac{\sum \text{Angkatan Kerja}}{\sum \text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$	Disnaker, BPS, BKK, IPK Online, SISKOTKLN, TKA Online, BLK, LPK, Perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja

2.	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) / Anjuran	$\frac{\sum \text{Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) / Anjuran}}{\sum \text{Kasus yang Dilaporkan (Dicatatkan)}} \times 100\%$	Disnaker, Perusahaan, Serikat Pekerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun - n	Hasil evaluasi AKIP	Kepala Dinas Tenaga Kerja

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang**

- INSTANSI : **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang**
- VISI : **“BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING”**
- MISI : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri
- TUJUAN : 1. Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing  
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
- TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- FUNGSI : a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang  
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang  
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang  
f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang  
g. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

<b>NO</b>	<b>KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah total panjang jalan}} \times 100\%$	Hasil survey dan laporan data	Bidang Bina Marga
2.	Terwujudnya Penyediaan Air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	Perbandingan jumlah debit air saluran irigasi dengan jumlah kebutuhan air terhadap total area pertanian x 100%	Hasil survey dan laporan data	Bidang Sumber Daya Air
3.	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi	Jumlah persentase pemenuhan tujuh layanan informasi jasa kontruksi	Hasil survey dan laporan data	Bidang Tata Bangunan dan Bina Kontruksi
		Persentase rekomendasi teknis IMB yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi teknis IMB yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permohonan teknis IMB yang masuk sesuai prosedur}} \times 100\%$	Hasil survey dan laporan data	Bidang Tata Bangunan dan Bina Kontruksi
4.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pengajuan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang}} \times 100\%$	Hasil survey dan laporan data	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
5.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP tahun - n	Hasil evaluasi AKIP	Kepala Dinas PUPR

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**

- INSTANSI** : **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**
- VISI** : **Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing**
- MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional
- TUJUAN** : 1. Meningkatkan kualitas Layanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil
- FUNGSI** : 1. Perumusan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;  
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;  
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;  
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;  
6. Pembinaan penyelenggaraan, fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;  
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM Unit Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun n	Hasil survey IKM Hasil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun n	Hasil survey IPP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****9. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Dinas Pertanian Kabupaten Jombang**

VISI : Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

MISI : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri

TUJUAN : 1. Meningkatkan PDRB sub kategori tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura  
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di bidang pertanian;  
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;  
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;  
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pertanian;  
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pertanian; dan  
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura	Laju pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura	$\frac{\text{Produksi tahun } n - \text{Produksi tahun } (n-1)}{\text{Produksi tahun } (n-1)} \times 100\%$	BPS Dinas Pertanian	Kepala Dinas Petanian
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Nilai evaluasi AKIP Dinas Pertanian	Kepala Dinas Pertanian

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang**

- INSTANSI** : **Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang**
- VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing
- MISI** : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Professional  
2. Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal Dan Industri
- TUJUAN** : 1. Meningkatnya Nilai tambah Produk Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah  
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan dan bidang perindustrian
- FUNGSI** :
- a. Perumusan kebijakan di Bidang perdagangan dan perindustrian
  - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang perdagangan dan perindustrian
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas perdagangan dan perindustrian
  - e. Penyelenggaraan fungsi – fungsi pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian
  - f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi – fungsi pelaksana urusan Pemerintahan daerah di bidang perdagangan dan bidang perindustrian; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi – fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	$\frac{\text{Jumlah omzet pelaku usaha tahun } n - (n-1)}{\text{Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Primer</li> <li>- Laporan pelaku usaha</li> </ul>	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Meningkatnya pertumbuhan IKM	Produktifitas tenaga kerja Industri	$\frac{\text{Omzet Industri}}{\text{Jumlah tenaga kerja IKM}} \times 100\%$	Data Primer	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase produk yang sudah terstandarisasi dan HKI	$\frac{\text{Jumlah produk IKM yang terstandarisasi}}{\text{Jumlah produk IKM yangt erfasilitasi}} \times 100\%$	Data Primer	
		Persentase pertumbuhan pelaku usaha IKM	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun } n - (n-1)}{\text{Jumlah IKM tahun } n-1} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Primer</li> <li>- Laporan tribulan IKM</li> </ul>	
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Laporan Hasil Reviu AKIP dari Inspektorat	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****11. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang**

- INSTANSI** : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang
- VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing
- MISI** : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional  
2. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal Dan Industri
- TUJUAN** : 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal  
3. Meningkatkan Investasi Daerah
- TUGAS** : Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Fungsi Pelaksana Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Di Bidang Penanaman Modal
- FUNGSI** : a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;  
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;  
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan  
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN/ FORMULASI</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatkan Daya Tarik Investasi	Nilai Investasi Tahun n	Nilai realisasi investasi tahun n	Laporan Data Realisasi Investasi Daerah	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perizinan	Nilai SKM layanan perizinan tahun n	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan	Nilai IPP di bidang PM dan Perizinan tahun n	Laporan Hasil IPP bidang PM dan Perizinan	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****12. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang**

**INSTANSI : Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang**

**VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing**

**MISI : Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri**

**TUJUAN : 1. Meningkatnya daya dukung infrastruktur untuk daya saing  
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi**

**TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perhubungan**

**FUNGSI : a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;  
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;  
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;  
e. Penyelenggaran fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan;  
f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan;  
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatnya Infrastruktur Lalu Lintas	Persentase fasilitas perhubungan yang berfungsi baik	<p>Jumlah Fasilitas Perhubungan yang berfungsi baik</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah total Fasilitas Perhubungan yang ada</p>	Database Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan
2.	Meningkatnya Keselamatan berlalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	<p>Jumlah kecelakaan tahun n - jumlah kecelakaan tahun n-1</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah kecelakaan pada tahun tahun n-1</p>	Data kecelakaan lalu lintas	Kepala Dinas Perhubungan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****13. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang**

**INSTANSI : Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang**

**VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter Dan Berdaya Saing**

**MISI : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri.**

**TUJUAN : 1. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman  
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi**

**TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di perumahan dan kawasan permukiman**

**FUNGSI :**

- 1 Perumusan Kebijakan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2 Pelaksanaan kebijakan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 3 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4 Pelaksanaan Administrasi Dinas Perumahan dan Permukiman;
- 5 Penyelenggaraan Fungsi-fungsi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 6 Pembinaan Penyelenggaraan Fungsi-fungsi Pelaksana Urusan Pemerintah Daerah dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan;
- 7 Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman	1. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak  2. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak  3. Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik  4. Persentase Rumah Layak Huni  5. Pesentase penanganan kawasan kumuh	$\frac{\text{Jml. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak}}{\text{Jml. Rumah Tangga} + (n+1)} \times 100\%$ $\frac{\text{Jml. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak}}{\text{Jml. Rumah Tangga} + (n+1)} \times 100\%$ $\frac{\text{Panjang Drainase yang Tertangani}}{\text{Panjang Total Drainase}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah} + (n+1)} \times 100\%$ $\frac{\text{Kawasan Kumuh} - \text{Kawasan kumuh Tertangani}}{\text{Luas Kawasan Kumuh} + (n+1)} \times 100\%$	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum  Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum  Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum  Bidang Perumahan  Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perumahan dan Permukiman	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****14. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama mewujudkan Jombang Berkarakter dan berdaya saing

MISI : Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya

TUJUAN : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah  
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro  
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro,  
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;  
e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;  
f. Pembinaan Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro  
g. Pelaksanaan Fungsi - fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya koperasi Berkinerja baik	Persentase koperasi berkinerja baik	$\frac{\text{Jumlah koperasi berkinerja baik}}{\text{Jumlah koperasi di Kabupaten Jombang}} \times 100$	Data Peningkatan perkoperasian	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.	Meningkatkan Usaha Mikro Aktif	Persentase Usaha Mikro Aktif	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan pendapatan dan omset}}{\text{Jumlah usaha mikro tahun n-1}} \times 100\%$	Data pelaku usaha mikro yang difasilitasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP Tahun n	Hasil evaluasi AKIP	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang**

**INSTANSI : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang**

**VISI :** Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

**MISI :** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional

**TUJUAN :** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, Akuntabel, transparan dan efektif serta penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas

**TUGAS :** Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

**FUNGSI :**

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Jmlah komponen A + komponen B + komponen C + Komponen D + komponen E</p> <p><i>Keterangan :</i>  Komponen A : Indeks kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran x bobot (bobot 12%)  Komponen B : Indeks pengalokasian anggaran belanja (bobot 20%)  Komponen C : Indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah (bobot 15%)  Komponen D : Indeks penyerapan anggaran (bobot 20%)  Komponen E : Indeks opini BPK ata LKPD (bobot 15%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen APBD</li> <li>- Dokumen Keuangan</li> <li>- Dokumen LKPD</li> <li>- Opini BPK</li> </ul>	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Indeks Pengelolaan Aset Daerah	<p>Jmlah komponen A + komponen B + komponen C</p> <p><i>Keterangan :</i>  Komponen A : Ketepatan waktu penyelesaian laporan BMD (20%)  Komponen B : Optimal pengelolaan aset yang dimanfaatkan (40%)  Komponen C : Persentase aset yang bersertifikat (40%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan BMD</li> <li>- Dokumen Pengelolaan Aset</li> <li>- Sertifikat ASet</li> </ul>	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP Tahun n	Hasil evaluasi AKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****16. Dinas Peternakan Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Dinas Peternakan Kabupaten Jombang**

**VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

**MISI** : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri

**TUJUAN** : Meningkatkan Kinerja Peternakan terhadap Perekonomian

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

**TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Peternakan

**FUNGSI** :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas peternakan;
2. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan dalam rangka peningkatan produksi peternakan;
3. Pelaksanaan pembinaan teknis, identifikasi masalah penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
4. Perumusan kebijakan teknis operasional, program dan pembinaan penyebaran dan pengembangan usaha peternakan;
5. Pelaksanaan Identifikasi masalah, penyiapan dan penataan redistribusi peternakan;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan usaha dan pemberian rekomendasi Izin Usaha Peternakan;
7. Penyusunan pusat informasi agribisnis, penyebaran informasi pasar dan promosi hasil peternakan;
8. Perumusan kebijakan pengembangbiakan dan penyebaran ternak, fasilitasi produksi bibit, dan peningkatan mutu genetik ternak serta pelestarian plasma nutfah;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Persentase pertumbuhan produksi Hasil Peternakan	$\frac{(\text{Produksi Tahun } n) - (\text{Produksi Tahun } n - 1)}{\text{Produksi Tahun } n - 1} \times 100\%$	Laporan Data Statistik Peternakan	Kepala Dinas Peternakan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai AKIP Tahun n	Hasil evaluasi AKIP Dinas Peternakan	Kepala Dinas Peternakan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

**INSTANSI** : **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

**VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional

**TUJUAN** : 1. Meningkatkan profesionalisme Aparatur

2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

**TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

**FUNGSI** : 1. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan

5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN	Hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit	Jumlah skor penilaian kriteria penilaian Merit System 1. Ketersediaan rencana kebutuhan pegawai (15%) 2. Pelaksanaan pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif (10%) 3. Pengembangan karir (30%) 4. Pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan (10%) 5. Target kinerja dan evaluasi kinerja (15%) 6. Penggajian dan pemberian penghargaan (10%) 7. Perlindungan dan pelayanan kepada pegawai (4%) 8. Ketersediaan Sistem, aplikasi dan fasilitas pendukung (6%)	1. Laporan pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan ASN 2. Laporan rekapitulasi penilaian kinerja, penghargaan dan kesejahteraan seluruh PNS 3. Laporan mutasi, penempatan jabatan ASN, dan pelaksanaan promosi, dan rotasi	Kepala BKPSDM
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai AKIP Tahun n	Hasil evaluasi AKIP BKPSDM	Kepala BKPSDM

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****18. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang**

**VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing.

**MISI** : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional  
2. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri

**TUJUAN** : 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatnya PDRB Sektor Perikanan  
3. Meningkatkan Jumlah, Kualitas dan Akses Pangan Masyarakat

**TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pangan dan bidang perikanan.

**FUNGSI** : a. Perumusan kebijakan di Bidang Pangan dan bidang Perikanan;  
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pangan dan Bidang Perikanan;  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pangan dan Bidang Perikanan;  
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;  
e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan dan bidang perikanan;  
f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang pangan dan Bidang Perikanan;  
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan Tahun n	Dokumen PPH	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	$\frac{(\text{Produksi Ikan Tahun } n - \text{Produksi Ikan Tahun } n-1)}{\text{Jumlah Produksi Ikan Tahun } n-1} \times 100\%$	Dokumen Statistik Perikanan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai AKIP Tahun n	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****19. Dinas Sosial Kabupaten Jombang**INSTANSI : **Dinas Sosial Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing

MISI : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri

TUJUAN : 1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan  
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan dibidang Sosial  
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Sosial  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial  
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial  
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial  
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial; dan  
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
----	---------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------

1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang Mandiri (PPKS yang keluar dari kepesertaan program)	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah PPKS yang Mandiri}}{\Sigma \text{ Jumlah PPKS}} \times 100\%$	BPS, Dinsos	Kepala Dinas Sosial
		Persentase capaian SPM Bidang Sosial	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah orang yang terlayani}}{\Sigma \text{ Jumlah orang yang berhak mendapatkan layanan}} \times 100\%$	Dinsos	Kepala Dinas Sosial
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai AKIP Tahun n	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****20. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang**

**VISI** : Bersama mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing

**MISI** : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional  
2. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, religius dan berbudaya

**TUJUAN** : 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan derajat Pendidikan pada sektor Literasi

**TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan

**FUNGSI** : 1. Perumusan Kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;  
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;  
4. Pelaksanaan administrasi Dinas perpustakaan dan kearsipan;  
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;  
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan  
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/ RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Fungsi Perpustakaan sebagai Sarana Pendukung Budaya Literasi guna Meningkatkan Kecerdasan Masyarakat	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan	<p>Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite</p> <p>-----</p> <p>-- X100%</p> <p>Jumlah penduduk Kabupaten Jombang</p>	Laporan kegiatan Bidang perpustakaan (Sistem Inlislite)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	Meningkatnya Tata kelola Kearsipan Daerah	Persentase Unit Kearsipan yang menerapkan tata kelola kearsipan secara baku	<p>Jumlah unit kearsipan yang menerapkan tata kelola kearsipan secara baku</p> <p>-----</p> <p>-- X 100%</p> <p>Jumlah OPD Se Kabupaten Jombang</p>	Laporan kegiatan Bidang Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai AKIP Tahun n	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 21. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang

INSTANSI	: <b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang</b>
VISI	: Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing
MISI	: Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya.
TUJUAN	: 1. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang 2. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender
TUGAS	: Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
FUNGSI	: a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. Pelaksanaan administrasi Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; e. Penyelenggaraan fungsi – fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi – fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang – bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan g. Pelaksanaan fungsi – fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif	$\frac{\Sigma \text{ Peserta KB Aktif}}{\Sigma \text{ PUS}} \times 100\%$	DPPKB PPPA	Dinas PPKB & PPPA
2.	Menurunnya Unmet Need	Persentase Unmet Need	$\frac{\Sigma \text{ Unmet Need}}{\Sigma \text{ PUS}} \times 100\%$	DPPKB PPPA	Dinas PPKB & PPPA
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	IDG ( Indeks Pemberdayaan Gender)	$1/3 (\text{Ipar} + \text{YDM} + \text{Linc.dis})$ <p><i>Keterangan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ipar = Keterlibatan perempuan</li> <li>- YDM = Perempuan Pengambil Keputusan</li> <li>- Linc.dis = Distriksi Pendapatan</li> </ul>	DPPKB PPPA	Dinas PPKB & PPPA
4.	Meningkatnya Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Komprehensif	$\frac{\text{Jumlah Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah Perempuan korban kekerasan yang melapor}} \times 100\%$	Data SIMFONI PPA	Dinas PPKB & PPPA

5.	Meningkatnya Perempuan Korban TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Perempuan korban TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif ----- X 100% Jumlah Perempuan korban TPPO yang melapor	Data SIMFONI PPA	Dinas PPKB & PPPA
6.	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perlindungan Khusus Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan komprehensif ----- X 100% Jumlah Anak yang melapor	Data SIMFONI PPA	Dinas PPKB & PPPA
7.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai AKIP Tahun n	Nilai Evaluasi AKIP Dinas PPKB & PPPA	Dinas PPKB & PPPA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang**

**INSTANSI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang**

**VISI : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing**

**MISI : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional  
2. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri**

**TUJUAN : 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatnya Keberdayaan Desa**

**TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa**

**FUNGSI :**

1. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusanpemerintahandaerhdibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Desa	Total nilai persepsi per unsur ----- x Nilai penimbang Total unsur yang terisi	Hasil survey IKM	DPMD
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Desa	$\sum (nilai\ aspek\ n \times\ bobot\ aspek\ n)$	Hasil survey IPP	DPMD
		Persentase Desa yang meningkat status pembangunannya	Jumlah desa yang meningkat nilai IDMnya ----- x 100% Jumlah seluruh desa	- Bidang Bina Pemdes - Bidang BangDes	DPMD
		Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	IPKP = $\sum Wi \cdot Di$ <i>Keterangan :</i> Wi = Bobot masing-masing dimensi Di = Nilai indeks masing-masing dimensi	Bidang PEM	DPMD
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif -----x100% Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat	Bidang PKPM	DPMD

		Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) yang berkontribusi pada PADes	$\frac{\text{Jumlah lembaga ekonomi desa (BUMDes) yang berkontribusi pada PADes}}{\text{Jumlah lembaga ekonomi desa (BUMDes)}} \times 100\%$	Bidang PEM	DPMD
4.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai AKIP Tahun n	Nilai Evaluasi AKIP DPMD	DPMD

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****23. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing

MISI : Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya

TUJUAN : 1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup  
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;  
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;  
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup  
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;  
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;  
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	$IPJ = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 M + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 A}{2}}$ <p>Keterangan :</p> <p>IPJ = Indeks pencemaran bagi peruntukan J            Ci = Konsentrasi parameter I (hasil pengukuran)            Lij = Baku mutu parameter I bagi peruntukan j            M = Maksimum            A = Average (rata-rata)</p>	Data IKLH	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} x (Ieu - 0,1)\right)$ <p>Ieu = 50% Indeks SO<sub>2</sub> + 50% Indeks NO<sub>2</sub></p>		
		Indeks Tutupan lahan	$IKL = 100 - \left(\frac{\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK\right) x 100\right)}{54,3}\right) x 50$ <p><b>DKK = Σ Rumus W di tutupan hutan + rumus W ditutupan belukar</b></p> <p><b>Rumus di tutupan hutan :</b></p> <p>W kanal di Lindung = <math>0,2 x 0,6 x 0,6 x \frac{TH\_FLG\_Kanal}{Luas\ FLEG}</math>            W kanal di Budidaya = <math>0,2 x 0,6 x 0,4 x \frac{TH\_FBG\_Kanal}{Luas\ FBEG}</math>            W terbakar di Lindung = <math>0,2 x 0,4 x 0,6 x \frac{TH\_FLG\_Bakar}{Luas\ FLEG}</math>            W terbakar di Budidaya = <math>0,2 x 0,4 x 0,4 x \frac{TH\_FBG\_Bakar}{Luas\ FBEG}</math></p>		

			<p><b>Rumus di belukar di kawasan hutan dan fungsi lindung :</b></p> <p>W kanal di Lindung = <math>0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLG\_Kanal + BL\_FLG\_Kanal \times 0,6)}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W kanal di Budidaya = <math>0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Kanal + BL\_FBG\_Kanal \times 0,6)}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W terbakar di Lindung = <math>0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLG\_Bakar + BL\_FLG\_Bakar \times 0,6)}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W terbakar di Budidaya = <math>0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Bakar + BL\_FBG\_Bakar \times 0,6)}{Luas\ FLEG}</math></p>		
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai AKIP Tahun n	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****24. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang**

**VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

**MISI** : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional  
 2. Mewujudkan Masyarakat Jombang Yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya  
 3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian daerah, Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal

**TUJUAN** : 1. Meningkatkan Kualitas Kepemudaan, Prestasi Olahraga dan Daya Saing Pariwisata  
 2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

**TUGAS** : Membantu Bupati Melaksanakan Fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga

**FUNGSI** :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata
- d. pelaksanaan administrasi dinas kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh Pemuda di Kabupaten Jombang}} \times 100\%$	Survey	Bidang Kepemudaan
2.	Meningkatnya desa/kelurahan yang aktif menyelenggarakan olahraga masyarakat	Persentase desa/kelurahan yang aktif menyelenggarakan olahraga masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang aktif}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Jombang}} \times 100\%$	Survey	Bidang Destinasi Pariwisata
3.	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah medali yang diperoleh	Jumlah perolehan medali tahun n	Laporan kegiatan	Bidang Olahraga
4.	Meningkatnya destinasi wisata yang layak dikunjungi	Persentase peningkatan jumlah destinasi wisata yang layak dikunjungi	$\frac{\text{Jumlah destinasi wisata yang layak dikunjungi}}{\text{Jumlah destinasi wisata di Kabupaten Jombang}} \times 100\%$	Survey	Bidang Destinasi dan Industri, Bidang Pemasaran Pariwisata
5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai AKIP Tahun n	Nilai Evaluasi AKIP DISPORAPAR	DISPORAPAR

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional

TUJUAN : 1. Mewujudkan sistem pendukung layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD  
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

TUGAS : Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD

FUNGSI : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;  
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;  
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan  
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks kualitas pelayanan publik (IKPP) Sekretariat DPRD	$\frac{(IKM \text{ Non Konversi} \times 2,5) + (IPP \times 2)}{2}$	Hasil survey IKM dan IPP Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP SETWAN	Nilai AKIP Tahun n	Nilai Evaluasi AKIP	Sekretaris DPRD

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****26. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang**

**VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter Dan Berdaya Saing

**MISI** : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional  
2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, berbudaya.

**TUJUAN** : 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan ketentraman, keamanan, ketertiban umum

**TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

**FUNGSI** : 1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat ;  
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat ;  
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman serta perlindungan masyarakat dengan instansi terkait ;  
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;  
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Terwujudnya penegakan Perda dan Perkada serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada, gangguan trantibum dan linmas	(Jumlah pelanggaran Perda/Perkada, gangguan trantibum dan linmas tahun n – 1) - Jumlah pelanggaran Perda/Perkada, gangguan trantibum dan linmas tahun n ----- X 100% Jumlah pelanggaran Perda/Perkada, gangguan trantibum dan linmas tahun n - 1	Hasil pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang**

- INSTANSI** : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang**
- VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter Dan Berdaya Saing
- MISI** : Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, berbudaya.
- TUJUAN** : Memulihkan Fungsi Sosial Masyarakat korban Bencana
- TUGAS** : membantu Bupati untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan, penanggulangan bencana, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi akibat bencana
- FUNGSI** : 1. Penyusunan, perumusan rencana program dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;  
2. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;  
3. Pelaksanaan urusan sekretariat;

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
-----------	----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------

1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persentase pemenuhan layanan dasar penanggulangan bencana	Jumlah layanan dasar penanggulangan bencana yang dipenuhi ----- x100% Jumlah layanan dasar penanggulangan bencana	BPBD Jombang	BPBD Jombang
2.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase pemenuhan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dipenuhi ----- x100% Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	BPBD Jombang	BPBD Jombang
3.	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP BPBD	BPBD Jombang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang****INSTANSI : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

MISI : Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya

TUJUAN : 1. Menurunnya potensi konflik IPOLEKSOSBUD  
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

TUGAS : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan pembinaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  
3. Pelaksanaan koordinasi di Bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan pembinaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan pembinaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatnya ketahanan Ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, politik, sosial, kemasyarakatan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi	Persentase potensi konflik IPLEKSOSBUD yang tertangani	Jumlah potensi konflik yang tertangani  ----- x 100%  Jumlah potensi konflik	Dokumen FKUB, FPK, FKDM, P4GN dan TKD, PUSKOPIM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 29. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

INSTANSI : **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang Bersih dan Professional

TUJUAN : 1. Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Birokrasi  
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

FUNGSI : 1. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;  
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;  
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan Daerah;  
4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah;  
5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Potensi	$\frac{\Sigma \text{ Realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\Sigma \text{ Potensi}} \times 100\%$	Laporan data Potensi dan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****30. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang**

VISI : Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika  
2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika	Indeks kualitas Pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika	$IKPP = [ (IKM \text{ non konversi} \times 2,5) + (IPP \times 2)] / 2$ Keterangan: IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat IPP = Indeks Pelayanan Publik	Laporan Kegiatan	Dinas KOMINFO
2.	Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	Hasil evaluasi oleh Kemeterian PAN dan RB	Hasil Evaluasi SPBE	Dinas KOMINFO
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP	Dinas KOMINFO

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****31. Rumah Sakit Umum Daerah Jombang**

INSTANSI : **Rumah Sakit Umum Daerah Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan Akintabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Mewujudkan pelayanan Rumah sakit yang memenuhi standar dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

FUNGSI : a. Penyelenggaraan pelayanan medis  
b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis  
c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan.  
d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan.  
e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.  
f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.  
g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.  
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan keselamatan pasien melalui tata kelola Rumah Sakit yang baik dan SDM yang profesional	Status Akreditasi RS	Nilai Akreditasi RSUD Jombang	Hasil survey Akreditasi	Direktur RSUD Jombang
		Nilai Indeks Kepuasan masyarakat	IKM RSUD Jombang tahun n	Hasil survey IKM RSUD Jombang	Direktur RSUD Jombang
		Nilai Indeks Pelayanan Publik	IPP RSUD Jombang tahun n	Hasil survey IPP RSUD Jombang	Direktur RSUD Jombang
		Persentase NDR (angka Kematian > 48 Jam)	$\frac{\text{Jumlah kematian} > 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah seluruh pasien dirawat}} \times 100\%$	Laporan kematian pasien rawat inap	Direktur RSUD Jombang
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP RSUD Jombang	Direktur RSUD Jombang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****32. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso**

INSTANSI : **Rumah Sakit Umum Daerah Ploso**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Mewujudkan Pelayanan Rumah Sakit yang berkualitas dan memenuhi standar dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan.

TUGAS : Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan untuk masyarakat dengan tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan menggunakan upaya pengobatan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu untuk peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan.

FUNGSI : a. Penyelenggaraan pelayanan medis;  
b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;  
c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;  
d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;  
e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;  
f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;  
g. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan  
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien RSUD Ploso melalui tata kelola yang	Persentase elemen penilaian yang memenuhi standar akreditasi	Jumlah bab yang elemen penilaiannya memenuhi standar akreditasi ----- x100%	Hasil survey Akreditasi	Direktur RSUD Ploso

	baik dan SDM yang profesional		Jumlah bab akreditasi Rumah Sakit		
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM RSUD Ploso tahun n	Hasil Survey	Direktur RSUD Ploso
		Nilai Indeks Pelayanan Publik	IPP RSUD Ploso tahun n	Hasil Survey	Direktur RSUD Ploso
		Persentase NDR (angka Kematian > 48 Jam)	$\frac{\text{Jumlah kematian} > 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 100\%$	Laporan kematian pasien rawat inap	Direktur RSUD Ploso
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP RSUD Ploso	Direktur RSUD Ploso

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****33. Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Bandar kedungmulyo	Camat Bandar kedungmulyo
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bandar kedungmulyo	IKM Kecamatan Bandar kedungmulyo tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Bandar kedungmulyo	Camat Bandar kedungmulyo
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Bandar kedungmulyo	IPP Kecamatan Bandar kedungmulyo tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Bandar kedungmulyo	Camat Bandar kedungmulyo
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa}} \times 100\%$	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Bandar kedungmulyo
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Bandar kedungmulyo

		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait -----x100% Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Bandar kedungmulyo
--	--	---	--	---	--------------------------

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 34. Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

INSTANSI : **Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Bareng	Camat Bareng
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bareng	IKM Kecamatan Bareng tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Bareng	Camat Bareng
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Bareng	IPP Kecamatan Bareng tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Bareng	Camat Bareng
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu -----x100% Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Bareng
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu -----x100% Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Bareng
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait -----x100% Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Bareng

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****35. Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Diwek	Camat Diwek
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Diwek	IKM Kecamatan Diwek tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Diwek	Camat Diwek
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Diwek	IPP Kecamatan Diwek tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Diwek	Camat Diwek
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa}} \times 100\%$	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Diwek
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Diwek
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan}} \times 100\%$	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Diwek

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****36. Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Kecamatan Gudo Kedungmulyo Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Gudo	Camat Gudo
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gudo	IKM Kecamatan Gudo tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Gudo	Camat Gudo
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Gudo	IPP Kecamatan Gudo tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Gudo	Camat Gudo
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa}} \times 100\%$	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Gudo
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Gudo
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan}} \times 100\%$	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Gudo

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****37. Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Jogoroto	Camat Jogoroto
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jogoroto	IKM Kecamatan Jogoroto tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Jogoroto	Camat Jogoroto
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Jogoroto	IPP Kecamatan Jogoroto tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Jogoroto	Camat Jogoroto
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa}} \times 100\%$	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Jogoroto
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Jogoroto
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan}} \times 100\%$	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Jogoroto

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****38. Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Jombang	Camat Jombang
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jombang	IKM Kecamatan Jombang tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Jombang	Camat Jombang
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Jombang	IPP Kecamatan Jombang tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Jombang	Camat Jombang
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa}} \times 100\%$	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Jombang
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Jombang

		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan}} \times 100\%$	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Jombang
--	--	---	--	---	---------------

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****39. Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh	Camat Kabuh
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kabuh	IKM Kecamatan Kabuh tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Kabuh	Camat Kabuh
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Kabuh	IPP Kecamatan Kabuh tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Kabuh	Camat Kabuh
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa}} \times 100\%$	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Kabuh
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Kabuh
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan}} \times 100\%$	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Kabuh

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****40. Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Kesamben	Camat Kesamben
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kesamben	IKM Kecamatan Kesamben tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Kesamben	Camat Kesamben
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Kesamben	IPP Kecamatan Kesamben tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Kesamben	Camat Kesamben
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa}} \times 100\%$	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Kesamben
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Kesamben
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan}} \times 100\%$	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Kesamben

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****41. Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Kudu	Camat Kudu
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kudu	IKM Kecamatan Kudu tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Kudu	Camat Kudu
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Kudu	IPP Kecamatan Kudu tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Kudu	Camat Kudu
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa}} \times 100\%$	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Kudu
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Kudu
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan}} \times 100\%$	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Kudu

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

#### **42. Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang**

**INSTANSI** : **Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang**

**VISI** : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

**TUJUAN** : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

**TUGAS** : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

**FUNGSI** :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Megaluh	Camat Megaluh
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Megaluh	IKM Kecamatan Megaluh tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Megaluh	Camat Megaluh
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Megaluh	IPP Kecamatan Megaluh tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Megaluh	Camat Megaluh
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa}} \times 100\%$	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Megaluh
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Megaluh

		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait -----x100% Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Megaluh
--	--	---	--	---	---------------

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****43. Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung	Camat Mojoagung
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mojoagung	IKM Kecamatan Mojoagung tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Mojoagung	Camat Mojoagung
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Mojoagung	IPP Kecamatan Mojoagung tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Mojoagung	Camat Mojoagung
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa}} \times 100\%$	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Mojoagung
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Mojoagung

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****44. Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Mojowarno	Camat Mojowarno
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mojowarno	IKM Kecamatan Mojowarno tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Mojowarno	Camat Mojowarno
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Mojowarno	IPP Kecamatan Mojowarno tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Mojowarno	Camat Mojowarno
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa}} \times 100\%$	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Mojowarno
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Mojowarno
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan}} \times 100\%$	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Mojowarno

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****45. Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	Camat Ngoro
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ngoro	IKM Kecamatan Ngoro tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Ngoro	Camat Ngoro
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Ngoro	IPP Kecamatan Ngoro tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Ngoro	Camat Ngoro
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa}} \times 100\%$	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Ngoro
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Ngoro

		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait -----x100% Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Ngoro
--	--	---	--	---	-------------

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****46. Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Ngusikan	Camat Ngusikan
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ngusikan	IKM Kecamatan Ngusikan tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Ngusikan	Camat Ngusikan
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Ngusikan	IPP Kecamatan Ngusikan tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Ngusikan	Camat Ngusikan
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa}} \times 100\%$	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Ngusikan
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Ngusikan
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan}} \times 100\%$	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Ngusikan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****47. Kecamatan Perak Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Kecamatan Perak Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Perak	Camat Perak
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Perak	IKM Kecamatan Perak tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Perak	Camat Perak
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Perak	IPP Kecamatan Perak tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Perak	Camat Perak
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa}} \times 100\%$	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Perak
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Perak
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan}} \times 100\%$	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Perak

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****48. Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Peterongan	Camat Peterongan
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Peterongan	IKM Kecamatan Peterongan tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Peterongan	Camat Peterongan
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Peterongan	IPP Kecamatan Peterongan tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Peterongan	Camat Peterongan
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa}} \times 100\%$	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Peterongan
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Peterongan
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan}} \times 100\%$	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Peterongan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****49. Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan	Camat Plandaan
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Plandaan	IKM Kecamatan Plandaan tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Plandaan	Camat Plandaan
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Plandaan	IPP Kecamatan Plandaan tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Plandaan	Camat Plandaan
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu -----x100% Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Plandaan
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu -----x100% Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Plandaan

		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait -----x100% Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Plandaan
--	--	---	--	---	----------------

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 50. Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang

INSTANSI : **Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Ploso	Camat Ploso
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ploso	IKM Kecamatan Ploso tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Ploso	Camat Ploso
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Ploso	IPP Kecamatan Ploso tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Ploso	Camat Ploso
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa}} \times 100\%$	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Ploso
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Ploso

		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait -----x100% Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Ploso
--	--	---	--	---	-------------

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 51. Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

INSTANSI : **Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan

- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Sumobito	Camat Sumobito
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumobito	IKM Kecamatan Sumobito tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Sumobito	Camat Sumobito
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Sumobito	IPP Kecamatan Sumobito tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Sumobito	Camat Sumobito
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu -----x100% Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Sumobito
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu -----x100%	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Sumobito

			Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa		
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait -----x100% Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Sumobito

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 52. Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang

INSTANSI : **Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Tembelang	Camat Tembelang
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tembelang	IKM Kecamatan Tembelang tahun n	Hasil survey IKM Kecamatan Tembelang	Camat Tembelang
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Tembelang	IPP Kecamatan Tembelang tahun n	Hasil survey IPP Kecamatan Tembelang	Camat Tembelang
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu -----x100% Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Tembelang

	Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu -----x100% Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Tembelang
	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait -----x100% Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Tembelang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**53. Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang**

INSTANSI : **Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang**

VISI : Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya saing

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional

TUJUAN : 1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

TUGAS : Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI : a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>RUMUS PERHITUNGAN/FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Wonosalam	Camat Wonosalam
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Wonosalam	IKM Kecamatan Wonosalam tahun n	Hasil survey IKM Kec. Wonosalam	Camat Wonosalam
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Wonosalam	IPP Kecamatan Wonosalam tahun n	Hasil survey IPP Kec. Wonosalam	Camat Wonosalam
		Persentase Evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	Jumlah laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang tepat waktu -----x100% Jumlah seluruh laporan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	Camat Wonosalam
		Persentase Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang tepat waktu -----x100% Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Wonosalam

		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah atau Instansi terkait	Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD / Instansi terkait -----x100% Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan	Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Wonosalam
--	--	---	--	---	-----------------

**BUPATI JOMBANG,**  
ttd

**MUNDJIDAH WAHAB**